

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Nremang-Garongan Kabupaten Kulon Progo.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Ngremang-Garonagan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian Direktur Jendral Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum mengajukan surat Persetujuan Penetapan Lokasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian turunlah Surat Keputusan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 2017 No. 280/KEP/2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Congot-Nremang Segmen Nremang-Garongan yang berada di Kabupaten Kulonprogo Provinsi DIY. Pembangunan tersebut dapat mendukung akan dibangunnya *New Yogyakarta International Airport (NYIA)*, maka kapasitas ruas jalan yang ada perlu ditingkatkan.

Tahapan-tahapan yang telah terlaksana dalam pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Ngremang-Garongan baru sampai Penilaian (Appraisal).

Dengan perkiraan nilai ganti kerugian senilai Rp. 1.750.000,-/m² serta alokasi anggaran sebesar Rp.616.051,700,- berada di ruas jalan Ngremang-Garongan (Sta. 12+405 - Sta. 19+450) yang masuk wilayah Kabupaten Kulon Progo tepatnya di Kecamatan Galur (Desa Karangsewu) dan di Kecamatan Panjatan (Desa Bugel, Desa Pleret dan Desa Garongan).

2. Hambatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Ngremang-Garongan Kabupaten Kulonprogo.

Dalam pelaksanaan Pembangunan JJLS Ruas Ngremang-Garongan di Kabupaten Kulon Progo factor penghambatnya diantaranya disebabkan oleh tidak ada ketersediaan anggaran atau keterbatasan dana yang dianggarkan dari Pemda setempat. Diwaktu bersamaan ada kegiatan yang membutuhkan pendanaan diprioritaskan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan di Gunungkidul. Tetapi dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2017 menyatakan bahwa APBN telah dirancang untuk tahun 2018 dalam kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi

B. Saran

Untuk Dinas Terkait :

Dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan JJLS di Kulon Progo, sebaiknya pada saat merancang proyek tersebut dan sudah mengetahui besaran anggaran yang harus disiapkan maka Dinas Terkait melakukan

koordinasi dan mencantumkan di APBN. Agar nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan tidak terkendala dengan dana.